



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KINERJA KELEMBAGAAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH

**Rais Agil Bahtiar**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[rais.bahtiar@dpr.go.id](mailto:rais.bahtiar@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Komisi II DPR RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah membahas program terkait pertanahan dalam rapat kerja, Senin, 25 Maret 2024. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, saat memimpin rapat kerja menjelaskan rapat kerja itu sekaligus rapat perdana dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Dalam rapat ini menghasilkan beberapa kesimpulan, satu di antaranya ialah Komisi II DPR RI memberikan apresiasi pada pencapaian target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kementerian ATR/BPN sebesar 101,87%. Namun, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN agar ke depannya tidak sekedar mengejar target, tetapi juga harus tetap memperhatikan dan menjaga tidak terjadinya kondisi tumpang tindih pendaftaran tanah yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa tanah di kemudian hari.

Adapun di sisi lain, Komisi II DPR RI juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN terhadap capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp7,87 triliun atau sebesar 97,56% dan mendorong Kementerian ATR/BPN RI terus meningkatkan kinerja agar target program prioritas pertanahan dapat tercapai secara optimal. Di samping itu, membahas soal penerapan sertifikat tanah elektronik yang agar lebih masif dijalankan sebagai bagian dari Program Prioritas Tahun 2024. Lebih lanjut, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjadi sentral registrasi sistem pertanahan (*single land administration system*) dalam mewujudkan sistem pemetaan nasional (*one map policy*), dan meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian lainnya dan jajaran instansi terkait.

Selain itu, satu hal yang menjadi perhatian adalah permasalahan mafia tanah. Komisi II DPR RI menyoroti upaya untuk memerangi mafia tanah yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, tetapi sudah selayaknya adalah juga sebagai tugas bersama semua pihak. Ditegaskan bahwa langkah pencegahan yang efektif harus dilakukan di internal Kementerian ATR/BPN untuk meminimalkan peluang bagi mafia tanah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, antara lain mengatakan, beberapa pegawai di Kementerian ATR/BPN justru ada yang harus dipersalahkan ketika mengurus kasus pertanahan. Dalam konteks ini disampaikan fakta tersebut saat menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, yang dalam kasus-kasus tersebut telah menyeret pejabat Kementerian ATR/BPN dimaksud, meskipun diakui ada yang masih dalam tahap penyelidikan. Namun, sebagian lainnya sudah masuk tahap penyidikan, bahkan sudah dijadikan tersangka atau terdakwa di pengadilan.

Dari beberapa kasus yang terjadi, muncul dugaan bahwa para pejabat Kementerian ATR/BPN yang terseret kasus hukum itu, sebenarnya justru sudah berbuat secara benar sesuai ketentuan. Mereka menerbitkan sertifikat tanah berdasarkan surat dari kepala daerah, hingga keterangan otoritas di tingkat desa. Namun ironisnya, mereka tetap dipersalahkan. Berkaitan dengan perkembangan persoalan-persoalan semacam ini, maka muncul pertanyaan mengenai kondisi minimnya dana yang disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk penanganan sengketa

tanah. Dalam hitungan secara sederhana, anggaran penanganan sengketa di Kementerian ATR/BPN diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 60 gugatan. Sementara, jumlah gugatan yang diterima setiap tahun dapat mencapai angka di kisaran 1.000.

Terhadap kasus mafia tanah, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk membuat terobosan guna penyelesaian kasus mafia tanah dengan merespons cepat laporan masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui satuan tugas (satgas) mafia tanah yang dibentuk, serta melakukan pengawasan internal dan pembenahan dalam tubuh Kementerian ATR/BPN.

## Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi terkait, khususnya Komisi II dapat menjalankan fungsi pengawasannya agar pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas mafia tanah dengan baik, antara lain menindak secara tegas para pelaku, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat, meningkatkan koordinasi antar-aparat dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, menyelenggarakan sertifikasi tanah, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melindungi tanahnya. Selain itu, melalui pelaksanaan fungsi legislasinya, DPR RI juga perlu mendukung pemerintah dalam melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Undang-Undang (UU) ini diperlukan untuk memperkuat UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan mengatasi berbagai permasalahan pertanahan. Selain itu, dengan UU Pertanahan ini diharapkan nantinya memberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kementerian ATR/BPN dalam mengatasi permasalahan sengketa tanah.

## Sumber

cnbcindonesia.com, 25 Maret 2024;

dpr.go.id, 26 Maret 2024;

kompas.com, 9 Maret 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



[@pusaka\\_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)



## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024